



PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TIMUR

BRIDA
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

POLICY BRIEF

KOLABORASI PENTAHELIX UNTUK MEMPERCEPAT INOVASI DAERAH **JAWA TIMUR**

SEBAGAI GERBANG BARU NUSANTARA

Inovasi Kebijakan dalam Mewujudkan Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara melalui Penguatan SDM, Konektivitas Ekonomi, Hilirisasi Potensi Daerah, dan Transformasi Digital

Subtema:

Kolaborasi Pemerintah, Akademisi, Dunia Usaha, dan Masyarakat dalam Mendorong Inovasi Daerah



DISUSUN OLEH
KELOMPOK

- Ir. Biasworo Adisuyanto Aka, MM
- Dr. Arie Cahyono, S.STP, M.Si.
- Dwi Indah Aprijani, SE., M.Ak.



**JAWA TIMUR
GERBANG BARU
NUSANTARA**

KOLABORASI PENTAHHELIX UNTUK MEMPERCEPAT INOVASI DAERAH JAWA TIMUR SEBAGAI GERBANG BARU NUSANTARA

Policy Brief

Tema:

Inovasi Kebijakan dalam Mewujudkan Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara melalui Penguatan SDM, Konektivitas Ekonomi, Hilirisasi Potensi Daerah, dan Transformasi Digital

Subtema:

Kolaborasi Pemerintah, Akademisi, Dunia Usaha, dan Masyarakat dalam Mendorong Inovasi Daerah

RINGKASAN EKSEKUTIF

Jawa Timur memiliki posisi strategis sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus simpul perdagangan, industri, pendidikan, logistik, dan konektivitas kawasan timur Indonesia. Pada 2025, perekonomian Jawa Timur tumbuh **5,33 persen**, dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai **Rp3.403,17 triliun**. Industri pengolahan menjadi sektor terbesar dengan kontribusi **31,32 persen**, sementara ekspor barang dan jasa tumbuh **6,63 persen**. Kinerja tersebut menunjukkan besarnya kapasitas Jawa Timur untuk memainkan peran sebagai *Gerbang Baru Nusantara*.

Namun, besarnya potensi tersebut belum otomatis menghasilkan ekosistem inovasi daerah yang terintegrasi. Inovasi masih berisiko berjalan secara sektoral, berbasis proyek, dan belum selalu terhubung secara sistematis antara kebutuhan pemerintah, kapasitas riset perguruan tinggi, kebutuhan dunia usaha, serta pengetahuan dan pengalaman masyarakat. Padahal, kompleksitas persoalan pembangunan—mulai dari penguatan SDM, produktivitas UMKM, hilirisasi komoditas, transformasi digital, hingga konektivitas ekonomi—tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah secara sendiri-sendiri.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebenarnya telah memiliki fondasi penting. Jawa Timur memperoleh penghargaan **BRIDA/BAPPERIDA Optimal 2025** dari BRIN untuk kategori optimalisasi potensi dan/atau penyelesaian permasalahan daerah. Pemprov Jatim juga menegaskan pentingnya riset, *quick research–quick response*, kolaborasi dengan perguruan tinggi dan industri, serta penguatan BRIDA sebagai ekosistem riset dan inovasi.

Policy brief ini menawarkan **Model Kolaborasi Pentahelix Inovasi Jawa Timur (KOPI JATIM)** sebagai mekanisme untuk mengubah kolaborasi dari sekadar forum koordinasi menjadi **rantai penciptaan nilai inovasi**. Model ini menghubungkan empat aktor utama—pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat—dengan BRIDA/BAPPERIDA sebagai *orchestrator* kebijakan dan inovasi, serta dukungan data dan teknologi digital sebagai *enabler*.

Tiga agenda kebijakan utama yang direkomendasikan adalah:

1. **Membangun Innovation Collaboration Hub Jawa Timur** sebagai wadah bersama untuk mengidentifikasi masalah, menghubungkan pengetahuan dan sumber daya, serta mengembangkan portofolio inovasi prioritas.
2. **Menerapkan mekanisme Challenge-Based Innovation**, yaitu pemerintah menetapkan masalah prioritas pembangunan dan membuka ruang bagi perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat untuk menawarkan solusi yang dapat diuji dan direplikasi.

3. **Membangun Innovation Pipeline dan Dashboard Dampak** untuk memastikan setiap inovasi memiliki tahapan yang jelas mulai dari identifikasi masalah, riset, prototyping, uji coba, implementasi, pengukuran dampak, hingga replikasi.

Dengan pendekatan tersebut, inovasi tidak lagi dipandang sekadar sebagai jumlah inovasi yang dihasilkan perangkat daerah, tetapi sebagai **instrumen peningkatan daya saing, produktivitas, kualitas pelayanan publik, penciptaan lapangan kerja, hilirisasi potensi daerah, dan kesejahteraan masyarakat**.

PENDAHULUAN DAN DESKRIPSI MASALAH

Jawa Timur dan Momentum Menjadi Gerbang Baru Nusantara

Jawa Timur mempunyai modal ekonomi yang kuat untuk mengambil posisi sebagai *Gerbang Baru Nusantara*. Struktur ekonominya ditopang industri pengolahan, perdagangan, transportasi, pertanian, serta jasa. Pada 2025, ekonomi Jawa Timur tumbuh 5,33 persen dan industri pengolahan menyumbang 31,32 persen terhadap struktur ekonomi. Neraca perdagangan Januari–Desember 2025 juga mencatat surplus sekitar **US\$0,81 miliar**, dengan ekspor US\$30,40 miliar dan impor US\$29,59 miliar.

Kondisi tersebut merupakan modal penting untuk mengembangkan Jawa Timur sebagai pusat pertumbuhan yang menghubungkan sumber daya lokal dengan pasar nasional dan global. Akan tetapi, transformasi menuju *Gerbang Baru Nusantara* membutuhkan lebih dari sekadar pembangunan infrastruktur fisik. Dibutuhkan kemampuan daerah untuk **menghasilkan, mengadopsi, dan menyebarluaskan inovasi** secara cepat.

Tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks. Pemerintah harus mampu meningkatkan kualitas SDM dan kompetensi digital, memperkuat produktivitas dan daya saing UMKM, mendorong hilirisasi potensi daerah, memperkuat konektivitas ekonomi, serta memastikan pelayanan publik semakin mudah, cepat, transparan, dan berbasis data.

Dengan demikian, persoalan kebijakan yang perlu dijawab bukan lagi **“bagaimana pemerintah menghasilkan lebih banyak inovasi?”**, tetapi:

“Bagaimana membangun ekosistem kolaboratif agar pengetahuan, teknologi, modal, kebijakan, dan partisipasi masyarakat dapat dikonversi menjadi inovasi yang berdampak dan dapat direplikasi?”

Masalah Kebijakan: Inovasi Belum Sepenuhnya Menjadi Ekosistem

Secara regulatif, pemerintah daerah mempunyai mandat untuk mengembangkan inovasi. PP Nomor 38 Tahun 2017 mengatur inovasi daerah mulai dari pengusulan, penetapan, uji coba, penerapan, penilaian, diseminasi, pendanaan, hingga pembinaan dan pengawasan. Tujuan akhirnya adalah peningkatan kinerja pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan daya saing daerah.

Di Jawa Timur, kerangka tersebut terus diperkuat. Rancangan perubahan regulasi penyelenggaraan inovasi daerah bahkan mengatur keterlibatan ASN, perangkat daerah, BUMD, dan masyarakat dalam pengusulan inovasi serta memperkuat peran BRIDA dalam mengoordinasikan inovasi.

Namun, terdapat setidaknya empat persoalan yang perlu mendapat perhatian.

1. Kolaborasi masih cenderung berbasis kegiatan

Hubungan pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat sering kali telah terbentuk melalui kerja sama, forum, penelitian, pelatihan, maupun program pemberdayaan. Persoalannya adalah belum semua kolaborasi tersebut menjadi

rantai inovasi yang berkelanjutan, dari identifikasi masalah hingga penerapan dan replikasi.

2. Riset belum selalu berujung pada implementasi

Perguruan tinggi memiliki sumber daya pengetahuan dan riset yang besar. Namun, sebagian hasil penelitian belum sepenuhnya terkoneksi dengan kebutuhan nyata pemerintah dan dunia usaha. Sebaliknya, kebutuhan inovasi pemerintah maupun industri belum selalu diterjemahkan menjadi agenda riset yang konkret. Hal ini penting karena Pemprov Jawa Timur sendiri telah menempatkan riset dan inovasi sebagai bagian penting pembangunan. Pada 2025, Pemprov Jatim menegaskan perlunya *quick research–quick response* serta penguatan kolaborasi dengan BRIN, perguruan tinggi, dan industri.

3. Dunia usaha belum optimal diposisikan sebagai co-creator

Dunia usaha tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat kebijakan atau mitra pembiayaan. Dunia usaha memiliki kemampuan dalam teknologi, pasar, manajemen, *business model*, dan *scaling-up*. Karena itu, keterlibatan dunia usaha perlu digeser dari pola “pelaksana program” menjadi “co-creator inovasi”.

4. Masyarakat belum sepenuhnya ditempatkan sebagai sumber inovasi

Masyarakat merupakan pengguna sekaligus pihak yang paling memahami persoalan di lapangan. Karena itu, inovasi yang tidak berangkat dari kebutuhan pengguna berisiko menghasilkan solusi yang secara administratif berhasil tetapi dampaknya terbatas.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip inovasi daerah yang menempatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat sebagai bagian penting dari tujuan inovasi.

ANALISIS KEBIJAKAN

Dari Pentahelix sebagai Forum menjadi Pentahelix sebagai Mesin Inovasi

Kolaborasi pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat perlu dirancang sebagai sebuah ekosistem produksi inovasi.

Dalam model yang ditawarkan, masing-masing aktor memiliki fungsi berbeda:

Aktor	Peran Utama
Pemerintah	Menentukan prioritas masalah, regulasi, data, fasilitasi, penganggaran dan <i>scaling-up</i>
Akademisi	Riset, <i>evidence</i> , teknologi, desain solusi dan evaluasi dampak
Dunia Usaha	Teknologi, investasi, <i>business model</i> , pasar dan replikasi
Masyarakat	Identifikasi kebutuhan, <i>co-design</i> , uji manfaat dan pengawasan sosial
BRIDA/BAPPERIDA	<i>Orchestrator</i> , integrator portofolio inovasi dan penghubung antaraktor

Pendekatan ini sebenarnya telah memiliki embrio di Jawa Timur. Pemprov Jatim telah menekankan penguatan sinergi pemerintah, dunia pendidikan dan industri, termasuk pengembangan *teaching industry* untuk memperkuat hubungan pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri.

Pada sektor digital, Renstra Dinas Kominfo Jawa Timur 2025–2029 juga menekankan kolaborasi dengan kabupaten/kota, akademisi, komunitas digital, dan dunia usaha untuk mempercepat transformasi digital daerah.

Artinya, tantangan berikutnya bukan membangun kolaborasi dari nol, melainkan **mengintegrasikan berbagai kolaborasi yang sudah ada ke dalam satu sistem inovasi daerah yang terarah, terukur, dan berorientasi dampak.**

REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Membentuk “Innovation Collaboration Hub Jawa Timur”

Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu membangun **Innovation Collaboration Hub Jawa Timur** sebagai *platform kolaborasi fisik dan digital* yang dikoordinasikan BRIDA/BAPPERIDA.

Fungsi utamanya:

- memetakan persoalan strategis daerah;
- mengidentifikasi kebutuhan inovasi;
- mempertemukan *problem owner* dengan peneliti, inovator, industri dan komunitas;
- membangun *database* inovasi, riset, teknologi dan talenta;
- menyediakan ruang *co-creation*;
- menghubungkan inovasi dengan sumber pembiayaan;
- mendokumentasikan inovasi yang berhasil untuk direplikasi.

Platform tersebut dapat diintegrasikan dengan ekosistem data dan transformasi digital Pemerintah Provinsi Jawa Timur sehingga keputusan inovasi berbasis **data dan evidence**.

2. Menerapkan “Challenge-Based Innovation”

Inovasi hendaknya dimulai dari **masalah nyata**, bukan dari keinginan membuat program baru.

Pemerintah menetapkan *regional innovation challenges*, misalnya:

- bagaimana meningkatkan produktivitas UMKM;
- bagaimana mempercepat hilirisasi komoditas unggulan;
- bagaimana menurunkan biaya logistik;
- bagaimana meningkatkan kompetensi tenaga kerja;
- bagaimana memperluas adopsi teknologi digital;
- bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- bagaimana mengatasi persoalan kemiskinan dan ketimpangan;
- bagaimana mengembangkan ekonomi hijau dan biru.

Setiap *challenge* kemudian dibuka kepada perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat untuk menawarkan solusi.

Model ini akan mengubah paradigma:

Government as Provider → Government as Problem Owner and Ecosystem Orchestrator.

3. Membangun “Innovation Pipeline”

Setiap inovasi strategis perlu mempunyai alur:

Problem Identification → Research → Co-Design → Prototype → Pilot Project → Evaluation → Scaling-Up → Replication

Dengan mekanisme tersebut, inovasi tidak berhenti pada tahap lomba, prototipe, atau penghargaan.

Setiap inovasi harus mempunyai:

- *problem statement*;
- indikator keberhasilan;
- *baseline*;
- target dampak;
- penanggung jawab;
- sumber pembiayaan;
- skema uji coba;
- hasil evaluasi;
- strategi replikasi.

4. Mengembangkan Skema Pembiayaan Kolaboratif

Keterbatasan APBD perlu dijawab melalui **collaborative financing**.

Sumber pembiayaan dapat dikembangkan melalui:

- APBD;
- CSR/TJSL;
- kerja sama pemerintah dan badan usaha;
- dana riset;
- perguruan tinggi;
- investasi dunia usaha;
- *impact investment*;
- pendanaan nasional;
- skema hibah kompetitif.

Dengan demikian, inovasi yang terbukti efektif tidak berhenti karena keterbatasan anggaran pemerintah.

5. Membangun Dashboard “Innovation Impact”

Keberhasilan inovasi harus diukur dari **dampaknya**, bukan semata jumlah inovasi.

Dashboard dapat mengukur:

Input → Process → Output → Outcome → Impact

Indikator dampak antara lain:

- efisiensi anggaran;
- peningkatan kualitas pelayanan;
- peningkatan produktivitas;
- peningkatan pendapatan masyarakat;
- penciptaan lapangan kerja;
- peningkatan investasi;
- peningkatan ekspor;
- peningkatan nilai tambah produk lokal;
- peningkatan kepuasan masyarakat;
- peningkatan inklusi digital.

Pendekatan ini akan memperkuat *evidence-based policy*. Jawa Timur sendiri telah memperoleh apresiasi BRIN terkait pemanfaatan kajian kebijakan berbasis bukti dan optimalisasi potensi/penyelesaian permasalahan daerah.

MODEL IMPLEMENTASI KOPI JATIM

“Kolaborasi Pemerintah, Akademisi, Dunia Usaha dan Masyarakat untuk Inovasi”

TAHAP 1 — IDENTIFIKASI MASALAH

Pemerintah + Masyarakat

↓

TAHAP 2 — RISET & CO-DESIGN

Akademisi + Pemerintah + Masyarakat

↓

TAHAP 3 — PROTOTYPING

Akademisi + Dunia Usaha + Komunitas

↓

TAHAP 4 — PILOT PROJECT

Pemerintah + Dunia Usaha + Masyarakat

↓

TAHAP 5 — EVALUASI DAMPAK

BRIDA/BAPPERIDA + Akademisi

↓

TAHAP 6 — SCALING-UP & REPLIKASI

Pemerintah + Dunia Usaha + Kabupaten/Kota

Target Strategis 2027–2029

Implementasi dapat diarahkan pada terbentuknya:

1. Satu (1) Innovation Collaboration Hub Jawa Timur;
2. Innovation Challenge tahunan berdasarkan prioritas RPJMD;
3. Portofolio inovasi prioritas lintas sektor;
4. Dashboard Innovation Impact;
5. Skema pembiayaan inovasi kolaboratif;
6. jejaring perguruan tinggi–industri–pemerintah–masyarakat di seluruh kabupaten/kota;
7. mekanisme replikasi inovasi unggulan dari satu daerah ke daerah lainnya.

PENUTUP

Jawa Timur memiliki modal ekonomi, sumber daya manusia, perguruan tinggi, industri, komunitas, dan kapasitas pemerintahan yang kuat untuk menjadi Gerbang Baru Nusantara. Tantangannya adalah bagaimana seluruh modal tersebut dikonsolidasikan menjadi kekuatan inovasi yang menghasilkan nilai tambah nyata.

Karena itu, kebijakan inovasi Jawa Timur perlu bergerak dari paradigma “inovasi sebagai program pemerintah” menuju “inovasi sebagai ekosistem kolaboratif.”

Pemerintah berperan sebagai orchestrator, akademisi sebagai knowledge producer, dunia usaha sebagai technology and market enabler, sedangkan masyarakat sebagai co-creator sekaligus beneficiary.

Dengan KOPI JATIM, kolaborasi tidak berhenti pada penandatanganan kerja sama atau forum koordinasi, tetapi menghasilkan *innovation pipeline* yang terukur: masalah diidentifikasi, solusi dirancang bersama, diuji, dievaluasi, dibiayai, diperluas, dan direplikasi.

Jawa Timur tidak cukup hanya menjadi daerah yang banyak berinovasi. Jawa Timur harus menjadi daerah yang mampu mengubah inovasi menjadi produktivitas, daya saing, investasi, lapangan kerja, pelayanan publik berkualitas, dan kesejahteraan masyarakat.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2026). *PDRB Harga Berlaku Jawa Timur Tahun 2025 Mencapai Rp3.403,17 Triliun dengan PDRB per Kapita Rp80,86 Juta*. Surabaya: BPS Provinsi Jawa Timur.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2026). *Perekonomian Jawa Timur pada Akhir Tahun 2025 Menunjukkan Kinerja yang Relatif Stabil*. Surabaya: BPS Provinsi Jawa Timur.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (2025). *Pedoman/ketentuan penulisan Karya Tulis Ilmiah dan Policy Brief*. Jakarta: LAN RI.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (2026). *Author Guidelines – Jurnal Analis Kebijakan*. Jakarta: LAN RI.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah*. Jakarta.
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur. (2025). *Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2029*. Surabaya.
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur. (2025). *Informasi BRIDA/BAPPERIDA Optimal 2025 dan Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi Jawa Timur*. Surabaya.
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur. (2025). *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2045*. Surabaya.
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur. (2025). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2029*. Surabaya.